

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengetahui alasan Rusia mengintervensi konflik Georgia dan Ossetia Selatan. Dengan menyajikan data dan fakta-fakta kebijakan militer Rusia yang diterapkan terhadap Negara-negara eks-soviet yang di dalamnya termasuk Georgia dan Ossetia Selatan.

Melihat sekilas kronologi kasus invasi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Georgia, maka fokus permasalahan disini adalah Rusia yang mendukung penuh kemerdekaan Ossetia Selatan dengan melakukan intervensi militer. Namun Georgia sendiri tidak menginginkan adanya intervensi dari Rusia. Kawasan Kaukasus dapat dikatakan sulit untuk dipisahkan dari strategi keamanan Rusia. Secara umum, Rusia berkepentingan untuk menjaga keutuhan wilayahnya di bagian selatan yang menjadi perbatasan (Dagestan, Chechnya, dan Ossetia Utara). Hal ini berkaitan dan sejalan dengan kebijakan luar negeri Rusia terhadap negara-negara di kawasan tersebut yaitu Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Rusia akan selalu mengambil langkah tegas karena pentingnya posisi Kaukasus yang di dalamnya sudah termasuk Georgia, Ossetia Selatan, dan Abkhazia. Apa yang dilakukan oleh Rusia tidak terlepas dari kekhawatiran akan menguatnya pengaruh pro-Amerika melalui beberapa peluang yang diciptakan, seperti dukungan finansial pada masa-masa perubahan kepemimpinan di Georgia.

Kata kunci: Konflik, Intervensi, Militer, Rusia, Georgia, Ossetia Selatan

Abstract

The main objective of this study is to discuss and find out the reasons for Russia's intervention in the conflicts between Georgia and South Ossetia. By presenting data and facts used by the Russian military which exemplifies ex-Soviet countries which include Georgia and South Ossetia.

Looking at a glimpse of the chronology of an invasive military case carried out by Russia against Georgia, this is the focus of what Russia fully supports South Ossetia by carrying out military operations. But Georgia itself does not want intervention from Russia. The Caucasus region can be said to be difficult to resolve from the Russian strategy. In general, Russia has an interest in maintaining the integrity of its territory in the southern part of the border (Dagestan, Chechnya, and North Ossetia). This is known and expanded with countries in the region, namely Georgia, Armenia and Azerbaijan. Russia will always take decisive steps because of available positions in Georgia including Georgia, South Ossetia and Abkhazia. What was done by Russia was inseparable from words that would strengthen pro-America through several opportunities that were created, such as Finance in the days of the Georgian leadership.

Keywords: Conflict, Intervention, Military, Russia, Georgia, South Ossetia

A. Pendahuluan

Konflik antara Georgia dan Rusia dipicu oleh adanya keinginan Ossetia Selatan untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Keinginan tersebut lantas didukung oleh Rusia yang memang menginginkan kemerdekaan pada Osetia Selatan sehingga dapat bergabung dengan Osetia Utara yang memang berada di bawah wilayah Rusia. Ossetia Selatan sendiri merupakan wilayah perbatasan antara Rusia dan Georgia yang memiliki otonomi khusus melalui perjanjian yang “membekukan” konflik antara Georgia dan Ossetia Selatan yang sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Status quo ini akan dilakukan oleh Georgia dan Ossetia Selatan hingga waktu yang tidak ditentukan. Sehingga sejak tahun 1991, dibentuklah Joint Peace Keeping Force (JPKF) yang berfungsi untuk menjaga gencatan senjata diantara keduanya. Adapun JPKF ini terdiri dari pasukan Rusia, Georgia, dan Ossetia.

Invasi yang dilakukan oleh Rusia berawal ketika Georgia memerdekakan diri pada tahun 1991 paska runtuhnya Uni Soviet dan pada saat itu Ossetia Selatan memang menjadi wilayah dibawah pemerintahan Georgia. Seperti kebanyakan negara-negara yang baru memerdekakan diri, Georgia mengalami masalah yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, maupun politik internal negaranya. Adapun masalah krisis ekonomi banyak melanda wilayah Ossetia Selatan, Abkhazia, dan Ajaria. Pada tahun 2003, setelah adanya revolusi mawar yang menandai jatuhnya presiden Eduard Shevardnadse akibat tuduhan korupsi di Georgia, lantas digantikan oleh presiden Mikhail Saakashvilli dengan janji untuk memperbaiki perekonomian negaranya dan menjunjung tinggi anti korupsi. Dengan reformasi demokrasi yang dibawanya, Mikhail Saakashvilli menjadi sosok pemimpin yang memang lebih dekat dengan Barat namun tetap menjaga hubungan baik dengan Rusia. Pada bulan Mei 2004, Ossetia Selatan melakukan pemilu parlemen namun tidak diakui oleh Georgia, hanya Rusia dan beberapa negara saja yang mengakui kemerdekaan Ossetia Selatan secara de jure. Setelah itu, untuk mengambil alih kekuasaan di Ossetia Selatan, Mikhail Saakashvilli memerintahkan pasukan keamanan khusus Georgia untuk melakukan operasi terkait penyelundupan yang ada di Ossetia Selatan. Penyelundupan adalah salah satu masalah besar di Georgia, sehingga barang-barang legal dan pasar gelap harus segera ditutup di wilayah-wilayah Georgia termasuk Ossetia Selatan. Melihat adanya pasukan lain selain dari JPKF memasuki Ossetia Selatan, pemerintah Ossetia Selatan menganggap bahwa ini adalah tindakan Georgia yang ingin mencairkan konflik “beku” yang terjadi diantara keduanya yang telah berlangsung hingga 12 tahun. Pasukan Georgia akhirnya terlibat ke dalam bentrok dengan milisi Ossetia pada bulan Juni dan Agustus 2004. (Nygren, 2008) Keadaan ini membuat presiden Georgia menganggap bahwa terdapat campur tangan dan pengaruh dari Rusia, dan mengatakan bahwa Rusia berada dibalik Ossetia Selatan. Sejak saat itu, hubungan diantara Georgia dan Rusia semakin memburuk hingga pada agustus 2008 terjadi invasi militer oleh Rusia dikarenakan Georgia menyerang wilayah Ossetia Selatan yang menewaskan pasukan keamanan Rusia juga warga sipil yang berpaspor Rusia yang ada disana.

Melihat sekilas kronologi kasus invasi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Georgia, maka fokus permasalahan disini adalah Rusia yang mendukung penuh kemerdekaan Ossetia Selatan dengan melakukan intervensi militer. Namun Georgia sendiri tidak menginginkan adanya intervensi dari Rusia. Ditambah dengan wilayah Abkhazia yang ingin memerdekakan

diri, Rusia semakin memiliki tanggung jawab untuk melindungi wilayah “near abroad”nya dari serangan-serangan yang bisa saja dilancarkan oleh Georgia. Dengan demikian, Rusia semakin meningkatkan hubungannya dengan Ossetia Selatan dan Abkhazia. Ditambah dengan Georgia yang meminta bantuan kepada NATO membuat Rusia semakin geram dan melakukan serangan balik terhadap pasukan Georgia yang ada di Ossetia Selatan dan Abkhazia mengingat ini juga berkaitan langsung dengan keamanan nasional Rusia karena letak geografis Georgia yang dekat dengan Rusia. Rusia menyatakan bahwa akan menarik mundur pasukannya apabila Georgia menarik pasukannya yang ada di Ossetia Selatan dan Abkhazia, namun Rusia sendiri tidak melihat respon yang baik dari Georgia untuk menarik mundur pasukannya.

Kawasan Kaukasus dapat dikatakan sulit untuk dipisahkan dari strategi keamanan Rusia. Secara umum, Rusia berkepentingan untuk menjaga keutuhan wilayahnya di bagian selatan yang menjadi perbatasan (Dagestan, Chechnya, dan Ossetia Utara). Hal ini berkaitan dan sejalan dengan kebijakan luar negeri Rusia terhadap negara-negara di kawasan tersebut yaitu Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Rusia akan selalu mengambil langkah tegas karena pentingnya posisi Kaukasus yang di dalamnya sudah termasuk Georgia, Ossetia Selatan, dan Abkhazia. Apa yang dilakukan oleh Rusia tidak terlepas dari kekhawatiran akan menguatnya pengaruh pro-Amerika melalui beberapa peluang yang diciptakan, seperti dukungan finansial pada masa-masa perubahan kepemimpinan di Georgia. (Fahrurudji, Konflik Ossetia Selatan dan Strategi Keamanan Rusia di Kawasan Kaukasus, 2009)

Pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia berusaha untuk tetap menjalin hubungan baik dengan negara-negara pecahannya yang didalamnya termasuk Georgia. Usaha tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Commonwealth of Independent States (CIS). Organisasi ini dibentuk pada tahun 1991 dan di harapkan bisa menjadi kelanjutan dari USSR. Georgia sendiri bergabung 2 tahun setelah pembentukan organisasi tersebut yaitu pada tahun 1993.

Tapi ternyata usaha Rusia dalam menjalin hubungan baik tersebut telah dikecewakan oleh keputusan Georgia untuk tidak memperbaharui keanggotannya dalam CIS Collective Security Treaty. Georgia ingin mengganti pasukan Rusia yang di tempatkan pada wilayah perbatasan konflik dengan pasukannya sendiri. Selain itu, Georgia juga ingin menghentikan pembangunan basis pertahanan Rusia dalam jangka panjang. Tindakan yang diambil Georgia ini menunjukkan bahwa Georgia ingin menjaga jarak dengan Rusia.

Situasi makin memanas ketika Georgia mulai terlihat aktif menjalin hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat dan Eropa dibidang keaman dan energi. Bahkan Georgia menyampaikan keinginannya untuk bergabung menjadi anggota NATO, seperti yang telah di sampaikan pasca perang dingin. Bahkan pada tahun 2004, Georgia menolak untuk menandatangani kesepakatan A-Good-Neighbor-Treaty yang diajukan oleh pihak Rusia. Georgia lebih memilih untuk meminta bantuan kepada Amerika Serikat. (Wibisono, 2013)

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Georgia mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun 2008. Serangan Rusia ke Georgia pada Agustus 2008 sangat mengagetkan dunia

internasional yang saat itu perhatian mereka terfokus pada pembukaan Olimpiade di Beijing. (Mankoff, 2009) Serangan Rusia dilancarkan dengan tujuan untuk memukul mundur pasukan militer Georgia yang saat itu berusaha untuk merebut kembali wilayah Ossetia Selatan. Dalam beberapa hari perang terus berlanjut antara Rusia yang menyerang pasukan Georgia di Ossetia Selatan. Rusia kemudian mengumumkan pengakuannya atas kemerdekaan Ossetia Selatan serta Abkhazia walaupun di sisi lain banyak mendapat protes dari negara-negara barat.

Sekitar 1.400 warga sipil tewas saat pasukan Rusia melancarkan invasi ke wilayah yang dipertikaikan di Ossetia Selatan, Georgia. Lebih dari 150 tank dan kendaraan tempur Rusia telah dikerahkan menuju Georgia saat pemberontak Ossetia Selatan digempur oleh pasukan Georgia. Serangan Rusia tersebut menyebabkan banyak bangunan yang roboh, kendaraan-kendaraan warga sipil yang hancur serta banyak mayat-mayat yang bergelimpangan ditepi jalan. Selain itu, akibat dari serangan yang dilakukan Rusia itu hanya menyisakan puing-puing bangunan akibat bom serta kepedihan hati mereka yang kehilangan anggota keluarga. Tidak hanya itu lebih dari 160.000 orang harus mengungsi dari wilayah Georgia. (Pudjomartono, 2017)

Namun kenyataannya, meskipun sudah jelas dinyatakan dalam piagam PBB bahwa setiap negara harus menghormati prinsip persamaan kedaulatan negara-negara anggota PBB, ada saja negara yang melanggarnya. Salah satunya adalah Rusia, apa yang dilakukan Rusia dengan menyerang wilayah kedaulatan Georgia tersebut khususnya Ossetia Selatan adalah perbuatan melanggar kedaulatan wilayah Georgia. Perbuatan yang dilakukan oleh Rusia ini sangat bertentangan dengan pasal 2 piagam PBB yang berbunyi, "The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members". (Organisasi bersandikan pada prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggota). Bahkan dalam situs resmi PBB juga menyatakan bahwa, "The members of the UN are sovereign nations, and the UN Charter one of the strongest safeguards of sovereignty, enshrining that principle as one of its central pillars" (anggota-anggota PBB adalah bangsa berdaulat dan Piagam PBB adalah salah satu pelindung kedaulatan yang terkuat, mengabadikan prinsip tersebut sebagai salah satu pilar utama). (Nation, 2017) Dengan kata lain kedaulatan merupakan salah satu "tiang" penegak bagi PBB. Negara anggota PBB mendapat jaminan bahwa kedaulatan negaranya terlindungi, tetapi juga berkewajiban untuk patuh pada prinsip dan tujuan PBB.

Menurut Hukum Humaniter Internasional khususnya Konvensi Jenewa 1949, warga sipil dan objek-objek non-militer adalah bagian yang harus dilindungi dan tidak boleh diserang saat terjadi konflik bersenjata. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan kejahatan perang, yang kemudian berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan paling serius. Hal yang dilakukan Rusia dengan melancarkan invasi ke wilayah yang dipertikaikan di Ossetia Selatan, Georgia tersebut, kemungkinan dapat membuat Rusia menjadi disalahkan karena telah melakukan perbuatan yang dapat didefinisikan sebagai kejahatan perang.

B. Kerangka Pemikiran

Untuk membantu penulis dalam menjawab pokok permasalahan diatas, penulis menggunakan satu kerangka teoritis, yakni: teori intervensi militer.

Setiap negara mempunyai metode dan strategi yang beragam dalam rangka mencapai kepentingan nasional dan menerapkan kebijakan luar negerinya. Berdasarkan perspektif kaum realisme, kekuatan negara berfokus pada pengembangan militer, karena kekuatan militer merupakan jalur alternatif untuk memperluas kekuasaan. Mayoritas negara-negara besar menghalalkan segala cara demi mencapai kepentingannya, termasuk mengambil langkah intervensi militer.

Adapun Intervensi menurut Bikhu Parekh yakni upaya mencampuri urusan negara lain dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan fisik yang diakibatkan oleh disintegrasi atau penyalahgunaan kekuasaan dari suatu negara dan membantu menciptakan struktur pemerintah sipil agar terus berjalan. Oleh karenanya alasan pencegahan dari adanya penderitaan fisik atau kemunculan korban yang meluas yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan bentuk intervensi menjadi sebab yang dibenarkan untuk dilakukan (Chang, 2011). Menurut Adam Roberts, suatu negara mengintervensi secara militer tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan dapat bertujuan untuk mencegah penderitaan atau kematian yang meluas di antara penduduk (Ryall, 2007).

Dari pengertian diatas aksi militer yang dimaksud yakni intervensi humaniter dengan situasi ketika sejumlah tindakan telah diambil untuk mencegah penderitaan yang diakibatkan oleh pemerintah represif atau konflik internal yang berkembang yang mana hak-hak politik dan sipil dari warga negara telah dilanggar. Intervensi militer didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan dengan melintasi perbatasan negara oleh kelompok negara dan organisasi regional dengan pembenaran alasan guna memulihkan perdamaian dan keamanan sebagaimana mengakhiri penderitaan dan pelanggaran HAM yang meluas melalui bantuan multilateral tanpa persetujuan dari negara yang mana intervensi tersebut terjadi (Eniayejuni, 2012). Disini, terdapat keunggulan dalam menggunakan intervensi militer bagi suatu negara yakni diantaranya adalah untuk melindungi warga tidak berdosa maupun membantu untuk menjatuhkan rezim.

Menurut Martin Ortega terdapat 10 pola intervensi militer berdasarkan contoh sejarahnya, yakni (Ortega, 2001):

1. Pola imperialistik: negara kuat mengintervensi secara militer di negara lain untuk memperoleh keuntungan, memperdalam kepentingannya, dan meningkatkan pengaruh terhadap negara target dan dunia internasional. Pola ini juga biasa disebut dengan intervensi hegemoni yang mana terjadi ketika negara hegemoni mengintervensi negara lain agar tidak lepas dari pengaruhnya guna menjauhkan perkembangan politik tidak disukai oleh kepentingannya.
2. Pola kolonial: kepentingan nasional dari negara kolonialis kuat dipaksakan dengan keras terhadap negara lemah, perang candu terhadap China dan diplomasi gunboat terhadap Amerika Latin pada abad ke-19 adalah contoh dari pola ini.

3. Perimbangan kekuatan. Selama berabad-abad ciri utama yang menagatur hubungan antar negara Eropa adalah perimbangan kekuatan antar negara berdaulat yang mengakibatkan terjadinya nonintervensi. Akan tetapi perang dan intervensi terkadang digunakan sebagai alat untuk memperbaiki keseimbangan dan mencegah transformasi dari sistem multipolar menjadi hegemoni yang didominasi oleh satu aktor. Dalam perang suksesi Spanyol, pada awal abad ke-18, justifikasi yang digunakan untuk intervensi asing adalah klaim dan pewaris tahta yang sah akan tetapi tujuan sebenarnya yakni mencegah Bourbon Perancis menjadi terlalu kuat.
4. Ideologi. Negara yang mengintervensi mencoba untuk mengubah sistem politik dari negara sasaran dengan alasan ideologi. Sebagai contoh, dari tahun 1815 sampai 1830 aliansi suci mengintervensi untuk mendukung rezim monarki ketika berhadapan dengan revolusi demokratik di Eropa. Sementara intervensi AS di tahun 1980-an dirancang untuk menegakkan demokrasi.
5. Penentuan nasib sendiri, intervensi dalam perang saudara bisa jadi mempunyai motif imperialistik atau ideologi, tapi niat yang ada terkadang untuk mendukung salah satu pihak yang mengklaim hak penentuan nasib sendiri. Persamaannya, intervensi asing juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang sedang berjuang melawan pendudukan kolonial.
6. Membela diri. Angkatan bersenjata digunakan negara untuk membalas serangan dari pihak-pihak yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintahnya. Tujuan dari intervensi ini tidak untuk menggulingkan pemerintah dari negara sasaran, tapi untuk mencegah serangan. Israel pada tahun 1980-an dan Turki di utara Irak sering mengintervensi berdasarkan pola ini.
7. Pola intervensi era perang dingin. Antara 1945 dan 1990 dua negara adidaya mengintervensi di wilayah yang dipersengketakan baik dalam pola imperialistik atau ideologi. Pola ini meluas pada masa dekolonisasi dalam sistem lingkungan bipolar yang tidak biasa sehingga pola baru intervensi dapat ditetapkan. Contohnya yakni intervensi Uni Soviet di Hongaria pada tahun 1956 dan Afghanistan tahun 1979, atau intervensi Amerika Serikat dalam perang saudara Vietnam dari tahun 1964.
8. Intervensi Humaniter. Satu atau dua kelompok negara menggunakan angkatan bersenjata untuk meredakan penderitaan manusia dalam wilayah negara lain. Terdapat dua situasi yang dibedakan antara lain; perlindungan warga negara di luar negeri, seperti intervensi Israel tahun 1976 di Enetebbe Uganda, atau perlindungan penduduk negara lain atau minoritas dalam contoh bencana kemanusiaan yang diprovokasi oleh pemerintah, seperti yang terjadi pada tahun 1991 dalam Operasi provide comfort di Irak utara.
9. Intervensi Kolektif. Komunitas internasional secara keseluruhan memutuskan untuk mengintervensi secara militer dalam suatu negara untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Terdapat dua perbedaan antara pola ini dan pola sebelumnya yakni pihak yang mengotorisasi intervensi ini adalah Dewan Keamanan PBB yang mewakili komunitas internasional tanpa berlandaskan fakta bahwa intervensi tersebut dilakukan oleh satu atau beberapa negara atau organisasi internasional yang bertujuan untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tipe intervensi ini hanya mungkin terjadi dalam

masyarakat suatu negara yang telah diorganisasikan dengan wewenang umum. Intervensi dengan kekuatan yang disahkan oleh DK PBB sepanjang tahun 1990-an terjadi di Irak, Somalia, Bosnia, Haiti, dan Timor Timur.

10. Intervensi untuk penghukuman. Beberapa negara melakukan serangan pada negara lain untuk menghukum kesalahan yang dilakukan terhadap negara lain. Serangan AS pada Libya tahun 1996, serangan rudal AS terhadap target di Sudan dan Afghanistan pada 1998 masuk dalam kategori ini.

Intervensi militer umumnya banyak dilakukan oleh negara-negara yang mempunyai kekuatan besar dalam rangka memenuhi kepentingan nasional ataupun kepentingan luar negerinya. Krisis yang berkembang pada Semenanjung Crimea, Ukraina tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan Rusia didalamnya. Satu bentuk campur tangan Rusia yakni dengan menetapkan kebijakan intervensi militer dalam menanggapi krisis yang berkembang. Putin telah mengirimkan sejumlah unit militernya pada Semenanjung Crimea, langkah ini mempunyai keterkaitan dengan kepentingan nasional maupun kepentingan luar negeri yang ingin dicapainya.

Pada kasus yang akan di bahas ini, penulis menggunakan pendekatan pola intervensi imperialistik dan perimbangan kekuatan seperti yang telah di jabarkan oleh Ortin Martega di atas. Kedua pola tersebut nantinya akan membantu penulis untuk menganalisa intervensi yang dilakukan oleh Rusia terhadap konflik Georgia dan Ossetia Selatan.

C. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Dari rumusan diatas, maka tipe penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu tipe penulisan deskriptif. Tipe ini membantu penulis dalam memberikan ulasan mengenai intervensi yang dilakukan Rusia terhadap konflik Georgia dengan Ossetia Selatan serta dampaknya.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah telaah pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur yang mendukung penelitian. Literatur ini berupa jurnal, buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan situs-situs internet ataupun laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data teoritis, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yang selanjutnya akan dianalisis, dimana penulis akan menjawab permasalahan berdasarkan fenomena-fenomena dan data yang telah di peroleh.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang akan penulis gunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Yaitu permasalahan yang diangkat akan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan

kemudian akan diselaraskan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

5. Metode penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deduktif. Dimana penulis terlebih dahulu memberikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang diteliti, selanjutnya memaparkan secara khusus setiap variabelnya dan saling keterkaitan dengan pengaruh antar variabel. Kemudian berdasarkan data-data yang didapat akan ditarik sebuah kesimpulan.

D. Hasil Penelitian

A. Mempertahankan Dan Meningkatkan Pengaruh Rusia Di Kawasan Kaukasus

Dalam menganalisa permasalahan keamanan Rusia, ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan Rusia terutama dalam hal menjaga stabilitas keamanan wilayahnya. Pertama, hubungan pemerintah pusat dengan warganya. Warga negara Rusia tidak hanya terdiri dari orang-orang Rusia yang tinggal di dalam wilayah Rusia, melainkan juga orang-orang Rusia yang tinggal di luar wilayah Rusia. Besarnya jumlah penduduk Rusia yang tinggal di luar wilayah Rusia terutama di kawasan Eks-Uni Soviet mengakibatkan Rusia harus meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemerintah yang berwenang dimana orang-orang Rusia tersebut tinggal. Kedua, hubungan pemerintah Rusia dengan pemerintah negara lain dalam kaitannya focus terhadap kawasan regional CIS. Peningkatan hubungan bilateral Rusia dengan negara-negara di kawasan CIS merupakan faktor penting yang mampu menjaga kestabilan wilayah Rusia, karena secara tidak langsung setiap terjadi konflik internal di dalam negara-negara CIS akan mengganggu kestabilan Rusia. Untuk itu, peningkatan hubungan kerjasama perlu dilakukan.

Seperti yang telah di jelaskan penulis pada bab pertama, bahwa intervensi militer merupakan salah satu bentuk strategi atau metode yang dilakukan sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan menerapkan kebijakan luar negerinya. Pada kasus intervensi Rusia pada konflik Georgia-Ossetia salah satu bentuk kepentingan yang ingin dicapai oleh Rusia adalah menjaga stabilitas keamanan nasional. Lebih luas lagi, sebagai pewaris kekuatan Uni Soviet, Rusia sampai saat ini selalu menekankan terhadap bekas wilayah Uni Soviet, baik yang di kawasan Eropa Timur maupun Asia Tengah. Wilayah Eropa-Asia merupakan orientasi geopolitik terpenting bagi Rusia. Rusia sendiri menginginkan status great power dan menjadi oposisi dari unilateralisme Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di NATO. Great power akan tercapai apabila Rusia menjalankan politik luar negeri yang waspada terhadap persaingan geopolitik dan mampu mempertahankan wilayah Eurasia.

Secara strategis, Rusia telah melakukan beberapa tindakan untuk menjaga stabilitas keamanan serta proses reintegrasi negara-negara eks-soviet dengan membentuk CIS (commonwealth of independent state). Negara anggota CIS percaya bahwa kepentingan nasional negara anggota yang berpartisipasi dalam integrasi tersebut akan diakomodir oleh Rusia. Kebanyakan mayoritas negara republik pasca Soviet bergantung pada Rusia dalam hal

solidaritas politik dan bantuan militer. Persepsi populer terhadap Rusia sebagai 'centre of gravity' tidak hanya karena luasnya wilayah dan besarnya sumber daya alam yang dimiliki oleh Rusia. Tapi karakter ideologi, politik, sejarah dan budaya yang dimiliki Rusia lah yang menjadikan Rusia dianggap sebagai penanggung jawab utama dalam proses integrasi kawasan eks-soviet (Hutabarat). Pengalaman di Uni Soviet tentang pengamanan daerah atau wilayah menjadikan Rusia paham dan tahu harus bagaimana bersikap untuk menjaga segala perbatasan yang ada. Gangguan sedikitpun akan segera diselesaikan dengan segala kemampuan Rusia yang saat ini besar dan bisa dikatakan dengan seimbang dengan kekuatan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, bahkan beberapa pengamat mengatakan Rusia jauh di atas Amerika Serikat dalam segala aspek baik ekonomi, militer, politik dan sosial-budaya walaupun hal itu tidak terlalu vulgar ditampilkan di media-media besar yang notabene adalah termasuk dalam jaringan alat propaganda Amerika Serikat (Juwita).

Untuk mewujudkan kepentingan stabilitas keamanan tersebut, segera setelah dilantik menjadi presiden Rusia Vladimir Putin langsung bergerak cepat dengan mengeluarkan tiga dokumen yang menjadi pedoman tentang sikap dan arah kebijakan dalam dan luar negeri dari Rusia. Adapun dalam the National Security Concept beberapa hal menjadi fokus utama, National Security Concept ini dibagi kedalam empat poin berbeda, poin pertama membahas tentang sikap Rusia dalam menghadapi ancaman dari dunia internasional atau dalam menghadapi isu-isu yang dianggap dapat mengancam keamanan serta kestabilan negara Rusia. Dalam poin pertama ini juga Rusia berusaha menunjukkan komitmen dan keinginannya dalam menyelesaikan masalah keamanan internasional. Poin kedua pada National Security Concept membahas tentang kepentingan Rusia dalam hal isu keamanan baik pada ranah nasional, regional maupun internasional. Adapun kepentingan-kepentingan ini menyangkut pertahanan kedaulatan, pencegahan agresi militer terhadap Rusia dan aliansinya, memperkuat posisi sebagai negara besar dan salah satu negara dengan pengaruh terbesar di dunia yang multipolar. Poin ketiga dalam dokumen ini membahas tentang hal-hal yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional Rusia. Beberapa yang menjadi isu yang dianggap mengancam bagi Rusia adalah potensi untuk melemahkan pengaruh Rusia dalam bidang politik, ekonomi dan militer di dunia internasional, ekspansi NATO dan blok-blok militer lainnya kewilayah Timur atau negara tetangga Rusia, potensi pengembangan senjata pemusnah massal oleh negara-negara lain. Dan pada poin ini juga disebutkan salah satu ancaman keamanan bagi Rusia adalah konflik perbatasan baik di Rusia maupun negara di sekitar wilayah Rusia. Poin terakhir dalam dokumen ini membahas tentang bagaimana kebijakan Rusia seharusnya dirumuskan untuk memastikan keamanan nasional bagi Rusia, dalam poin ini Rusia menekankan bahwa pengendalian terhadap senjata pemusnah massal dan barang-barang militer lainnya menjadi fokus utama agar tercipta keamanan baik bagi Rusia maupun dunia internasional (Association, 2000).

Keputusan Georgia untuk keluar dari CIS adalah awal dari munculnya keputusan untuk mengintervensi konflik tersebut. Alasan Georgia untuk mengundurkan diri dari keanggotaan CIS dikarenakan Georgia menganggap bahwa dominasi Rusia pada komunitas tersebut terlalu kuat dan Georgia lebih cenderung ingin menjadi negara demokrasi seperti ideologi yang dipegang oleh blok Barat dan lebih memilih untuk mendekati diri kepada NATO yang di

ketuai oleh AS. Dari alasan itu, Rusia menganggap bahwa kecenderungan Georgia kepada NATO akan sangat mengganggu stabilitas dan proses reintegrasi kawasan eks-soviet.

Kawasan Kaukasus dapat dikatakan sulit untuk dipisahkan dari strategi keamanan Rusia. Secara umum, Rusia berkepentingan untuk menjaga keutuhan wilayahnya di bagian selatan yang menjadi perbatasan (Dagestan, Chechnya, dan Ossetia Utara). Hal ini berkaitan dan sejalan dengan kebijakan luar negeri Rusia terhadap negara-negara di kawasan tersebut yaitu Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Rusia akan selalu mengambil langkah tegas karena pentingnya posisi Kaukasus yang di dalamnya sudah termasuk Georgia, Ossetia Selatan, dan Abkhazia. Apa yang dilakukan oleh Rusia tidak terlepas dari kekhawatiran akan menguatnya pengaruh pro-Amerika melalui beberapa peluang yang diciptakan, seperti dukungan finansial pada masa-masa perubahan kepemimpinan di Georgia (Fahrurudji, Konflik Ossetia Selatan dan Strategi Keamanan Rusia di Kawasan Kaukasus, 2009).

Rusia masih memandang wilayah kaukasus rawan dengan konflik, sehingga Rusia masih perlu ikut turun tangan guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah itu. Selama ini Rusia juga masih menerapkan kebijakan yang keras dengan mengedepankan kekuatan militernya. Faktor pendorong Rusia dalam penerapan kebijakan itu adalah Rusia sadar bahwa saat ini semua negara berusaha untuk memperluas pengaruhnya baik dengan menggunakan hard power atau soft power. Bagi Rusia kekuatan militer merupakan salah satu cara merepresentasikan kebijakan luar negerinya karena pencegahan terhadap perang sangat sulit untuk dilakukan. Bagi para pembuat kebijakan Rusia saat ini negara-negara tidak lagi menggunakan pendekatan politik di antara sesama negara. Dengan kata lain, negara dengan kekuatan militer yang besar merupakan ancaman bagi Rusia.

Walaupun disitu tidak di jelaskan secara khusus bahwa Ossetia Selatan merupakan prioritas. Namun Rusia tidak ingin mengambil resiko jika Ossetia Selatan tetap berada di wilayah kekuasaan Georgia sedangkan Georgia menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung dalam keanggota NATO. Karena sudah tentu hal tersebut akan sangat mengganggu stabilitas keamanan Rusia. Selain itu Rusia juga masih memiliki keuntungan secara geografis, ekonomi, sosial dan budaya melalui peninggalannya di Ossetia Selatan pada era Soviet lalu. Asset-aset akan dibutuhkan untuk memastikan interdependensi antara Rusia dan negara eks-Soviet.

Rusia beberapa kali melancarkan operasi militer ketika Georgia berusaha mempertahankan Abkhazia dan Ossetia Selatan. Selain itu upaya Rusia untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di kawasan Eropa Timur terlihat pada perilaku Rusia terhadap Georgia terkait dengan keinginan Georgia untuk menjadi anggota NATO dan UE. Rusia memiliki sejumlah kekhawatiran bahwa negara tersebut akan tersedot dalam pengaruh UE. Begitu pula perlakuan Rusia terhadap Ukraina. Ketika Ukraina mendapat tawaran untuk menjadi anggota terakhir UE, keinginan Ukraina untuk menjadi anggota UE tersebut terus mendapat halangan dari Rusia. Misalnya, Rusia melihat pemilihan umum di Ukraina pada November 2004 lalu mendapat pengaruh usaha Barat untuk menyedot Rusia dalam struktur NATO-EU yang akhirnya berujung pada terjadinya Revolusi Oranye (Sanders, 2006)

Gleb Pavlosky, penasihat mantan Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, kepemimpinan di Rusia telah menyimpulkan bahwa setelah Revolusi Oranye di Ukraina, Moskwa ingin mencegah hal serupa terjadi lagi. Rusia menganggap Ukraina dan Georgia, yang juga mengalami Revolusi Mawar yang memenangkan Saakashvili, sebagai pengaruh buruk di kawasan Rusia. Fakta bahwa Georgia didukung Barat membuatnya menjadi sasaran empuk. Kesalahan Saakashvili adalah terlalu percaya diri bahwa Barat akan berada di belakangnya. Rupanya, dia salah perhitungan karena Barat hanya bisa bersuara keras tanpa bisa bertindak lebih jauh. Rusia memanfaatkan retorika Barat yang disebut intervensi kemanusiaan untuk ikut serta dalam 'pertunjukkan' Georgia-Ossetia Selatan (Ninik, 2008).

Pemerintahan Rusia dengan terang-terangan memang mendukung pemisahan diri Ossetia Selatan untuk menjadi negara yang merdeka dan berdiri sendiri. Penyerangan Georgia ke Ossetia Selatan direspon dengan serangan balik oleh Rusia, mereka menggempur lewat darat dan udara, tidak hanya membebaskan Ossetia Selatan, tapi juga menyerang jauh ke wilayah Georgia. Rusia melumpuhkan radar militer, bandara serta basis militer Georgia. Negeri itu kian terjepit karena Rusia juga menyerang melalui Abkhazia, yang sejak lama ingin memisahkan diri dari Georgia. Ribuan tentara Rusia juga ikut menyerang pasukan Georgia dan memberi ruang bagi kapal-kapal perang Rusia untuk membuat basis militer di perairan Laut Hitam(news, 2014).

Inti kepentingan Rusia salah satunya terletak pada masalah keamanan nasionalnya. Berdasarkan kedudukan geostrateginya Rusia memiliki rasa terancam yang kuat atas bangsa-bangsa lain. Seperti yang sempat disinggung di paragraf sebelumnya, Rusia tidak mirip Amerika Serikat. Rusia mempunyai benteng alami berupa dua samudra di pantai Timur dan Baratnya, memiliki perbatasan darat langsung paling panjang di dunia dengan banyak negara. Dengan kedudukan land locked position ini Rusia sangat bergantung pada situasi seberang perimeternya. Untuk itu perlu dilakukan upaya dan strategi pengamanan wilayah di sekitar perbatasannya. Itu dapat dilakukan melalui pembentukan daerah penyangga (bufferzone) yang bukan hanya berfungsi sebagai benteng pengaman tetapi juga sebagai alas pijak untuk memproyeksikan kekuatan militernya (Fahrurodji, Konflik Ossetia Selatan dan Strategi Keamanan Rusia di Kawasan Kaukasus, 2009).

Karena itu, perluasan keanggotaan NATO ke wilayah negara-negara satelit eks Uni Soviet seperti salah satunya Georgia sudah barang tentu akan dipersepsikan sebagai ancaman yang sangat potensial bagi kedaulatan teritorial Rusia. Jadi, adalah suatu kewajiban bagi Rusia untuk menjawab tantangan Amerika Serikat sebagai otak dari setiap keterlibatan NATO pada setiap konflik yang mungkin timbul di mandala Erioa, dengan senjata konvensional maupun nuklir.

B. Mencegah Masuknya Kekuatan As Di Kawasan Eks-Soviet

Setelah berakhirnya era Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya pemimpin kekuatan blok Timur, Uni Soviet, tatanan dunia semakin rumit, bahkan semakin rumit bila dibanding era perang ideologi antara Uni Soviet melawan NATO (North Atlantic Treaty Organization). NATO sebagai pemenang Perang Dingin semakin lama semakin berusaha memperkuat ideologinya, bahkan ke wilayah-wilayah yang seharusnya bukanlah tempat NATO. Mereka

melakukan perluasan ke timur Eropa, hingga mencapai negara-negara bekas Uni Soviet yang telah terpecah belah, seperti Ukraina dan Georgia. Meskipun rencana perluasan hanyalah wacana dan belum terealisasikan, namun Rusia, sebagai negara pecahan Uni Soviet terbesar, berusaha untuk mencegah agar NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat tidak dapat mengajak negara-negara Eropa Timur bergabung.

Kekalahan Uni Soviet dalam Perang Dingin memberikan peluang bagi NATO untuk menyebarkan pengaruhnya ke wilayah Eropa Timur. Pada awal pembentukan pakta warsawa, wilayah Eropa Timur merupakan bagian dari penerapan kebijakan Luar Negeri Uni Soviet. Namun sayangnya, ketakutan akan kebangkitan ideologi komunisme dan ancaman munculnya rezim Stalin baru membuat negara-negara yang tergabung di dalam pakta warsawa harus mengundurkan diri. Hal ini lah yang dipandang NATO sebagai salah satu faktor keberhasilannya menghancurkan Uni Soviet selain krisis ekonomi yang memang sedang melanda Uni Soviet pada saat itu (Fahrurudji, *Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budaya*, 2005, hal. 224)

Pergerakan ekspansi NATO ke wilayah Timur mulai terlihat saat Polandia, Republik Ceko, Hungaria, dan Baltik bergabung ke dalamnya. Setelah menyadari itu, pergerakan politik maupun militer apapun yang Rusia tidak tergabung di dalamnya di anggap sebagai ancaman keamanan Rusia (Fahrurudji, *Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budaya*, 2005, hal. 224).

Kekhawatiran Rusia terhadap rencana perluasan NATO di wilayah Eropa Timur menjadi sebuah tekanan yang besar untuk Rusia, karena Rusia sendiri masih berusaha untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Rusia masih menjadi negara yang kuat dan mendominasi di dunia. Hal tersebut tentunya akan menjadi polemik yang cukup berat bagi Rusia karena harus attack dan defence dalam waktu yang hampir bersamaan.

Setelah pemerintahan negara Georgia baru yang pro-Barat dan menjunjung demokrasi muncul pada tahun 2003, Russia mulai menunjukkan ketidaksukaannya pada Georgia yang pro-Barat. Rusia yang sebelumnya bertindak sebagai mediator dan penjaga perdamaian dalam konflik Georgia dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan, perlahan ikut menjadi bagian dari konflik tersebut (Cornell, *Georgia After The Rose Revolution: Geopolitical Predicament and Implications for U.S. Policy*, 2007). Rusia secara konsisten mendukung gerakan secessionism melawan Georgia, baik secara politik maupun militer sejak awal tahun 1990-an. Rusia menolak untuk menarik pasukannya dari basis militernya di wilayah Georgia. Rusia juga menjatuhkan bom di beberapa targetnya di wilayah Georgia. Berbagai cara dilakukan Rusia untuk menjatuhkan pemerintahan Rusia, termasuk tekanan ekonomi melalui ketergantungan Georgia akan energi Rusia.

Georgia sangat menikmati bantuan dari AS dan negara-negara di Eropa Tengah, kecuali Jerman dan negara-negara yang memiliki kedekatan hubungan ekonomi dan politik dengan Rusia (Perancis, Itali, Yunani dan Spanyol). Mereka yang memiliki relasi dekat dengan Rusia menganggap bahwa keikutsertaan NATO di konflik Georgia akan merusak hubungan Rusia-NATO. Selain itu, negara yang sedang mengalami konflik juga disarankan

untuk bergabung dalam keanggotaan NATO (Group I. C., Georgia and Russia: Clashing Over Abkhazia, 2008).

Keinginan untuk bergabung ke dalam keanggotaan NATO sebenarnya sudah diwacanakan sejak kepemimpinan Shevarnadze. Tapi pada saat Saakashvili menjabat, wacana tersebut dijadikan prioritas utama. Karena dia melihat adanya jaminan kemerdekaan dan secara penuh dari Rusia, keamanan, stabilitas, dan integritas wilayah jika Georgia sudah masuk ke dalam keanggotaan NATO. Pada referendum yang diadakan pada tahun 2008, pemerintah Georgia melakukan voting kepada warganya untuk mengetahui respon dari warganya mengenai wacana keanggotaannya ke dalam NATO. Dan hasilnya 77% warga Georgia setuju agar Georgia bergabung ke dalam NATO. Dari hasil voting tersebut pemerintah Georgia semakin yakin dengan keputusannya untuk bergabung menjadi keanggotaan NATO. Setelah mendapatkan hasil dari voting tersebut, pemerintah Georgia mengeluarkan kebijakan MAP (Membership Action Plan) yaitu kebijakan mengenai percepatan follow up keanggotaan Georgia ke dalam NATO. Karena Georgia khawatir, jika Georgia tidak segera mengurusnya Rusia akan menghambat kepentingannya tersebut (Group I. C., Georgia and Russia: Clashing Over Abkhazia, 2008, hal. 14).

Usaha Georgia untuk menjadi anggota NATO juga dinilai tidak setengah-setengah, Georgia bersikeras untuk menjadi anggota NATO dengan turut serta aktif menurunkan militer Georgia bersama AS, yaitu kegiatan di Afghanistan dan misinya di Irak. Tidak hanya menurunkan pasukan militernya bersama NATO, Georgia juga mulai memperluas demokrasi serta perbaikan institusional di dalam negerinya. Tindakan ini dilakukan oleh Georgia sebagai refleksi dari keinginannya untuk bergabung menjadi anggota NATO. Jika Georgia berhasil, maka Georgia akan diterima menjadi anggota NATO, karena telah memenuhi syarat yang diajukan oleh NATO.

NATO menekankan bahwa Rusia tidak dapat mem-veto keinginan Georgia untuk masuk ke dalam keanggotaan. Sekretaris NATO, Jaap de Hoop Scheffer, mengatakan, jika sebuah negara memenuhi kriteria dan dia mempunyai keinginan yang kuat untuk bergabung maka NATO tidak ada alasan untuk menolaknya (Group I. C., Georgia and Russia: Clashing Over Abkhazia, 2008, hal. 14)

Dengan adanya invansi NATO terhadap negara-negara disekitar wilayah Rusia, secara politis membuat Rusia terancam. Rusia merasa bahwa NATO menghalanginya untuk menjadi negara yang berpengaruh di kancah Internasional. Intimidasi yang dirasa oleh Rusia akibat NATO ini, mengakibatkan Rusia mengeluarkan kebijakan militer dalam bentuk doktrin militer dengan kebijakan peningkatan kekuatan militer (Hardoko, 2015).

Rusia melihat perluasan NATO ke wilayah timur merupakan sebuah ancaman langsung. Padahal pada negosiasi yang diadakan di Jerman pada tahun 1990 Rusia telah dijanjikan tidak akan ada ekspansi NATO ke wilayah Timur jauh. Mereka menyepakati dominasi di masing-masing wilayah. Tapi NATO tidak mematuhi kesepakatan tersebut dan Rusia juga tidak dapat menuntutnya karena perjanjiannya di bentuk secara informal dan tidak

ditulis dalam dokumen resmi (Group I. C., Georgia and Russia: Clashing Over Abkhazia, 2008, hal. 15)

Rusia terintimidasi dengan melihat Amerika Serikat dan sekutunya yang sampai sekarang masih berusaha memperebutkan hegemoni dan pengaruhnya di Eropa, Asia, serta negara-negara lain di seluruh dunia. Pengajuan diri Georgia yang begitu disambut hangat oleh Amerika Serikat, serta keseriusan Georgia dengan menjadi anggota NATO dan Uni Eropa membuat Rusia khawatir, karena Rusia merasa bahwa AS ingin mendominasi kekuatannya di Eropa Timur. Fase perang dingin antara Georgia dan Rusia pun dimulai.

Rencana perluasan NATO ke timur memberikan ketakutan tersendiri bagi Rusia. Perluasan NATO tersebut dikhawatirkan akan merusak keseimbangan strategis AS dan Rusia di Eropa Timur, karena pengaruh AS di kawasan tersebut akan semakin besar. Rusia terlihat melancarkan usaha pembendungan terhadap rencana ekspansi dan perluasan pengaruh negara-negara Barat di Eropa Timur. Hal ini tak terlepas dari fokus utama kebijakan luar negeri Rusia yang masih terkait dengan kebijakan luar negeri AS dan kebijakan keamanan (Trenin D. , 2007). Para pemikir strategis Rusia melihat AS sebagai “dangerous nation”. Dari perspektif politik, Rusia percaya bahwa setelah perang dingin berakhir, AS masih memandang Rusia sebagai lawan, seperti AS melihat China, Iran dan Korea Utara. Bagi Rusia, AS tidak menginginkan Rusia untuk menjadi negara yang kuat, AS menganggap Rusia sebagai pesaing yang kompetitif dan rival terkuatnya dalam kancah internasional. Sehingga perilaku dan kebijakan AS, terutama di area vital kepentingan Rusia seperti Eurasia menjadi suatu ancaman bagi Rusia dan kepentingan-kepentingan Rusia.

Respon Rusia melalui peningkatan militer merupakan bentuk reaksi Rusia terhadap perluasan keanggotaan yang dilakukan oleh NATO di Eropa Timur. Perluasan ini dianggap dapat merusak tatanan global, serta mengancam keamanan nasional Rusia. Namun Politik

Luar Negeri Rusia tetap memainkan peranan yang dominan di negara-negara bekas pecahan Uni Soviet tersebut dan menjadi aktor aktif yang berpengaruh dalam masalah-masalah Internasional.

Perluasan Keanggotaan NATO di Eropa Timur termasuk dalam politik luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi. Semua yang dilakukan Rusia tidak lebih karena keadaan yang memaksa melakukan reaksi. Jadi perluasan NATO ke Eropa Timur, terutama ke 3 negara Baltik yang merupakan negara pembentuk kesatuan Uni Soviet, adalah ancaman menurut Rusia. Rusia merasa Negara-negara bekas Uni Soviet merupakan warisan yang sangat penting bagi Rusia, karena Rusia selalu ingin menekan penguasaan terhadap negara-negara tersebut. Oleh karena itu Rusia sangat terancam karena dampak-dampak perluasan keanggotaan NATO ke Eropa Timur dapat mengancam keamanan geopolitik Rusia. Mengancam keamanan yang dimaksud yaitu:

1. Rusia semakin kehilangan pengaruhnya di negara-negara post-Soviet dan akan membuat Rusia menjadi terisolir

2. Dapat mempengaruhi pencapaian kepentingan Nasional Rusia dalam upaya kekuasaannya di negara-negara CIS
3. Hilangnya kawasan penyangga serta kawasan rute minyak dan gas di laut Kaspia yang sudah lama dalam kekuasaan Rusia
4. Serta berpengaruh pada Keamanan Nasional Rusia

Jadi hal-hal tersebut yang membuat Rusia sangat menentang adanya perluasan keanggotaan NATO ke Eropa Timur. Perluasan NATO ke Eropa Timur merupakan bentuk aksi yang dimana mendapat tanggapan pro dan kontra dari kawasan Eropa Timur itu sendiri. Namun aksi NATO tersebut mendapatkan kecaman keras dari Rusia yaitu dengan meningkatkan militernya supaya kawasan bekas Uni Soviet berfikir ulang untuk bergabung, hal tersebut merupakan bentuk reaksi Rusia terhadap langkah-langkah NATO memperluas anggotanya yang dimana diyakini Rusia dapat mengganggu keamanan Nasional Rusia dan Rusia merasa terancam sehingga meningkatkan kapabilitas militernya.

E. Kesimpulan

Intervensi militer Rusia terhadap Georgia disebabkan oleh kondisi ekonomi, kekuatan dan kemampuan militer, dan perluasan NATO ke Timur. Dengan intervensinya ini, Rusia menunjukkan pada dunia, bahwa negara pewaris Uni Soviet ini masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan pengaruhnya di sekitar kawasannya.

Intervensi militer Rusia terhadap Georgia di Ossetia Selatan bukan merupakan sebuah kejadian tunggal namun merupakan kelanjutan dari konflik antara Georgia dan Ossetia Selatan yang dibekukan setelah intervensi Rusia pada tahun 1992. Konflik Georgia-Ossetia Selatan merupakan konflik yang memiliki akarnya pada pemaksaan Georgia oleh kekaisaran Rusia pada abad ke-19 dan upaya Ossetia Selatan untuk melepaskan diri dari Georgia dan bergabung bersama saudara-saudara etnisnya di Ossetia Utara yang masih termasuk dalam wilayah Rusia.

Di Rusia telah terjadi perdebatan panjang mengenai peran dan posisi Rusia di dalam komunitas dunia, yaitu sebagai bagian dari Barat (Eropa), Timur (Asia), atau keduanya (EURASIA). Kebijakan luar negeri Rusia sejak 1991 hingga 2008 turut diwarnai oleh perdebatan ini yang kemudian berimbas pada orientasi kebijakan luar negeri. Rusia memiliki kepentingan nasional yang termaktub dalam dokumen konsep keamanan nasional tahun 2000. Di lingkup dunia internasional antara lain ialah:

- Memperkuat status kekuatan besar yang dimiliki Rusia sebagai penerus Uni Soviet
- Membina hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di sekitar kawasannya

Faktor-faktor kondisi ekonomi, kekuatan dan kemampuan militer, serta perluasan NATO menjadi latar belakang keputusan Rusia untuk mengintervensi militer terhadap Georgia. Kinerja perekonomian Rusia mengalami penurunan setelah menerapkan kebijakan

pada tahun 1992 dan perlahan-lahan mengalami kenaikan pada awal tahun 2000. Akibat kekalahan di Perang Chechnya 1, militer Rusia pun turun.

Presiden Georgia Mikhail Saakashvili yang pro terhadap Barat tentu akan berusaha mendekatkan negaranya dengan Barat, antara lain dengan berusaha bergabung menjadi anggota NATO ataupun Uni Eropa. Tujuan Mikhail Saakashvili tersebut tentu tidak dapat tercapai dengan mudah, karena Rusia akan menentang keanggotaan negara-negara bekas Uni Soviet ke dalam organisasi regional Barat, baik NATO maupun Uni Eropa. Terlebih dengan bangkitnya Rusia, tentu pihak Barat juga akan melakukan mempertimbangan matang untuk dapat menerima Georgia ataupun negara bekas Uni Soviet sebagai anggota.

NATO memperluas keanggotaannya pada tahun 1999 dan 2004 dengan memasukkan negara-negara eks Uni Soviet dan Pakta Warsawa. Rusia merasa dikesampingkan atas perluasan keanggotaan NATO dan Rusia menganggap bahwa NATO tidak memberlakukannya dengan sesuai sebagai status kekuatan yang besar.

Rusia merasa terancam dengan keinginan bergabungnya Georgia ke NATO. Jikalau semua itu terjadi, maka NATO berada didepan garis hadapan Rusia secara langsung. Perluasan NATO dianggap sebagai permasalahan eksternal Rusia yang dihadapinya saat ini, sehingga keinginan Georgia yang mau bergabung dengan NATO disebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Rusia kedepan.

Selain faktor intervensi militer Rusia kedalam konflik di Ossetia Selatan ini, konflik yang terjadi antara Georgia dan Rusia di Ossetia Selatan pada tahun 2008 ini pun terbukti merupakan aksi provokasi yang dilakukan oleh Georgia. Pemerintah Georgia terbukti telah terlebih dahulu menyerang pasukan perdamaian Rusia di Ossetia Selatan dan melakukan penyerangan terhadap kelompok separatis yang berada di Ossetia Selatan. Penyerangan tersebut tentu akan membuat Rusia melakukan perlindungan terhadap warganya, sehingga membuat Rusia masuk menyerang ke wilayah Ossetia Selatan.

Dari seluruh rangkaian kesimpulan diatas menyimpulkan kembali bahwa ketika Georgia melancarkan gencatan senjata terhadap Ossetia Selatan pada tahun 2008. Dan tujuan penyerangan Georgia ini untuk mempercepat keanggotaannya pada NATO dan Uni Eropa, karena Georgia terbukti mendapatkan ancaman serius dari Rusia. Sesuai dengan kepentingan nasional Georgia, Georgia berusaha untuk menjaga integritas wilayahnya dengan mengambil alih wilayah yang dikuasai oleh kelompok separatis, namun harus dengan cara perundingan damai tanpa kekerasan. Penggunaan kekerasan oleh Georgia dalam menyelesaikan masalah di dalam negerinya sudah merupakan pelanggaran terhadap kebijakannya sendiri. Oleh karena itu pihak Rusia menjawab dengan memasuki wilayah konflik tersebut. Karena Rusia menilai dengan intervensinya ini maka konflik antara Georgia dan Ossetia Selatan akan berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chang, C. (2011). *Ethical Foreign Policy: US Humanitarian Interventions*. Burlington, US: Ashgate Publishing.

Cornell, S. E. (2001). *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*. London: Routledge.

Cornell, S. E. (2002). *Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in The South Caucasus-Cases in Georgia*. Uppsala University, 141.

Cornell, S. E. (2007). *Georgia After The Rose Revolution: Geopolitical Predicament and Implications for U.S. Policy*. *Strategic Studies*, 5.

Fahrurudji, A. (2005). *Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Fahrurudji, A. (2009). *Konflik Ossetia Selatan dan Strategi Keamanan Rusia di Kawasan Kaukasus*. Glasnost.

Hardoko, E. (2015). *Dituduh Rusia Jadi Penyebab Perang Dunia II, Polandia Meradang*. Jakarta: Kompas.

King, C. (2008). *Five Day War*. *Foreign Affairs*, 2-11.

Mankoff, J. (2009). *Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics*. UK: Rowman & Littlefield Publisher Inc.

Masoed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Nye, J. (1997). *Understanding International Conflicts*. In J. Nye, *Understanding International Conflicts* (p. 134). New York: Longman.

unaryono, B. (2012). *Rusia Pascalomunisme: Jalan Panjang Menuju Perubahan*. Yogyakarta: Prudent Media.

Thompson, K. W. (2010). *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Trenin, S. E. (2004). *The Russian Military: Power and Policy*. New York: United States: American Academy of Arts and Sciences.

JURNAL

Bernstein, P. (2015). *Putin's Russia and US Defense Strategy*. Washington DC: National Defense University.

Group, I. C. (2007). *Georgia: Sliding Toward Authoritarianism? Europe Report N°189*, 3.

- Group, I. C. (2008). Georgia and Russia: Clashing Over Abkhazia. Europe Report, 13.
- Hutabarat, L. F. (n.d.). Euranisme dan Kebijakan Luar Negeri Rusia. Jurnal Kementerian Luar Negeri Indonesia, 18.
- McDermott, R. N. (2011). Russian Nuclear Weapons Past, Present and Future. United States: SSI.
- Nygren, B. (2008). The Rebuilding Greater Russia: Putin's Foreign Policy Toward the CIS Country. London: Rountledge.
- Nygren, B. (2008). The Rebuilding Greater Russia: Putin's Foreign Policy Toward the CIS Countries. London: Rountledge.
- Ortega, M. (2001). Military Intervention and European Union. Paris: Institute for Security Studies Western European Union.
- Ryall, R. a. (2007). The Price of Peace: Just war in the twenty-first century. Cambridge: Cambridge University Press.
- S.G. Luzyanin, K. G. (2008). Glasnost Vol 4 No 2, 21-22.
- Sanders, D. (2006). Ukraine After The Orange Revolution: Can It Complete Military Transformation and Join The U.S. Led War on Terrorism? Strategic Studies, vi.
- Trenin, D. (2007). Russia's Threat Perception an Strategic Posture. Strategic Studies, 35.

WEBSITE

- Association, A. C. (2000, January 1). Russia's National Security Concept. Retrieved from www.armscontrol.org: https://www.armscontrol.org/act/2000_01-02/docjf00
- Blank, S. J. (2011, Maret). Russian Military Politics and Russia's 2010 Defense Doctrine. Retrieved from www.clingendael.org: https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20110300_haas_doctrine.pdf
- Eniayejuni, A. T. (2012, April 7). The Role of the West and Military Intervention in Libya. Retrieved from Foreign Policy Jurnal Web Site: <https://www.foreignpolicyjournal.com/2012/04/07/the-role-of-the-west-and-military-intervention-in-libya/>
- Government, W. H. (2008, September 3). Fact Sheet: US support for Georgia. Retrieved April 20, 2018, from White House Web Site: <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/09/20080903-6.html>
- Group, I. C. (2004, November 26). Georgia: Avoiding War in South Ossetia. Retrieved February 25, 2018, from International Crisis Group Web Site: <https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/georgia/georgia-avoiding-war-south-ossetia>

<http://www.nti.org>. (2007, May). Deputy of Commonwealth of Independent States. Retrieved from NTI Building a Safer World: <http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/cis.pdf>

Indonesia, K. R. (2018, Februari 25). lima prinsip dasar kebijakan luar negeri Rusia. Retrieved from Kedutaan Besar Federasi Rusia Untuk Indonesia: https://indonesia.mid.ru/web/indonesia_ind/kebijakan-luar-negeri-rusia1

Juwita, R. C. (n.d.). peran media massa di Amerika Serikat dalam mempengaruhi kebijakan invasi ke irak pada tahun 2003. Universitas Udayana, 4.

Nation, U. (2017, november 15). United Nation. Retrieved from United Nation Web Site: <http://www.un.org/geninfo/ir/index.asp?id=110#q5>

news, s. (2014). Rusia tolak tuduhan kejahatan perang di Georgia. jakarta: skalanews.com.

Ninik, F. R. (2008, Agustus 24). Menggambar Ulang Garis Perang Dingin. Retrieved April 10, 2018, from Kompas Web Site: <https://nasional.kompas.com/read/2008/08/24/0045542/menggambar.ulang.garis.perang.dingin>

Pudjomartono, S. (2017, November 15). Retrieved from <http://www.sarapanpagi.org>

Ramsbotham, O. (2006). Contemporary Conflict Resolution. In O. Ramsbotham, Contemporary Conflict Resolution (pp. 277-283). Cambridge: Polity Press.

Security, G. (n.d.). Georgia Sustainment and Stability Programme. Retrieved April 20, 2018, from Global Security Web Site: <https://www.globalsecurity.org/military/ops/gssop.htm>

Security, G. (n.d.). Georgia Train and Programme. Retrieved April 20, 2018, from Global Security Web Site: <https://www.globalsecurity.org/military/ops/gtep.htm>

Security, G. (n.d.). War in Georgia. Retrieved Maret 26, 2018, from Global Security Web Site: <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/georgia.htm>

S

Wibisono, K. (2013, mei 2). AS dukung upaya Georgia bergabung dengan NATO. Retrieved from antaranews: <https://www.antaranews.com/berita/372528/as-dukung-upaya-georgia-jadi-anggota-nato-ue>